

GOVERNMENT PARTNERS: STUDI HUBUNGAN ULAMA DAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT

Jurnal Analisa Sosiologi

Juli 2024, 13 (3):678-706

Maulana Janah*

Abstract

This research aims to describe the strategic position of Ulama in the system and structure of society having changes due to development. This position is directly proportional to the diverse responses to regional development issues in Tasikmalaya. The next goal is to explain the position of Ulama as partners, mediators, actors, and motivators of work ethic development in Tasikmalaya government. This research employs a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation studies. The data processing is carried out by means of reduction, display, and verification. They have been classified and categorized so that they can be presented properly. As a framework and analysis, the theory used in this research is Geertz's theory, namely Ulama as cultural brokers combined with Horikoshi's theory, namely political entrepreneurs. The results prove that they are positioned as political mediators and regional development involved in policy formulation and local regulation making. Ulama as a symbol of religious authority and legitimacy, their involvement can be seen in responding to and providing support for local government policies. Furthermore, they are also positioned as social actors who initiate and are intensely involved in the process of educational development. The development is related to the application of religious values, Ulama as guardians of Islamic tradition and orthodoxy. Finally, they also act as motivators who provide direction and guidance on work ethic. They are independent entrepreneurs. The result of this research makes a theoretical contribution to the development of anthropology and sociology of religion. Practically, it is useful for regional and community development policies.

Keywords: *Ulama, Mediator, Social Actor, Motivator.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi ulama yang strategis dalam sistem dan struktur masyarakat yang sedang mengalami perubahan akibat pembangunan. Posisi tersebut berbanding lurus dengan beragamnya respons terhadap persoalan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya. Tujuan selanjutnya, untuk menjelaskan posisi ulama sebagai mitra Pemerintah Kota Tasikmalaya. Menjelaskan ulama sebagai mediator pembangunan politik dan aktor pembangunan pendidikan. Disamping hal tersebut, untuk menjelaskan ulama sebagai motivator pembangunan etos kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara,

* Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

Correspondence email: maulanajanah@unik-cipasung.ac.id

dan studi dokumentasi. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang tersedia diklasifikasi dan dikategorisasi sehingga data tersebut dapat disajikan dengan baik. Sebagai kerangka kerja dan analisis, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Geertz, yaitu ulama sebagai *pialang budaya* yang dipadukan dengan teori Horikoshi, bahwa ulama merupakan *entrepreneur politik*. Hasil penelitian membuktikan bahwa ulama berposisi sebagai mediator politik dan pembangunan daerah yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pembuatan peraturan daerah. Ulama sebagai simbol pemegang otoritas dan legitimasi keagamaan, keterlibatan mereka dapat dilihat dalam merespons dan memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, ulama juga berposisi sebagai aktor sosial yang menggagas dan terlibat secara intens dalam proses pembangunan pendidikan. Pembangunan yang dilakukan terkait dengan penerapan nilai-nilai agama, ulama sebagai penjaga tradisi dan *ortodoxi* Islam. Terakhir, ulama juga bertindak sebagai motivator yang memberikan arahan dan bimbingan tentang etos kerja. Mereka merupakan kaum *wirausahawan* yang mandiri. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis untuk perkembangan antropologi dan sosiologi agama. Dan secara praktis bermanfaat untuk kebijakan pembangunan daerah dan masyarakat.

Kata Kunci: Ulama, Mediator, Aktor Sosial, Motivator

PENDAHULUAN

Studi tentang hubungan ulama dan pemerintah dalam konteks pembangunan daerah relatif sedikit dan jarang ditemukan. Bahkan terdapat perbedaan dalam melihat hubungan tersebut. Posisi sosial ulama menurut kajian terdahulu memperlihatkan adanya upaya bagi pembangunan dan perubahan suatu masyarakat. Adanya perbedaan pandangan terkait posisi dan otoritas ulama dalam realitas sosial. Perbedaan pandangan tersebut pada satu sisi menjelaskan bahwa ulama tidak hanya berperan dalam domain keulamaan, tetapi juga memberikan jalan keluar atas persoalan sosial yang terjadi dalam konteks sosial dan pembangunan. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap keterlibatan ulama dalam pemecahan persoalan pembangunan suatu daerah. Selama ini ada kesan pembangunan kurang melibatkan tokoh agama seperti ulama. Berbeda dengan daerah lain, penelitian ini dilatarbelakangi oleh ulama dan Pemerintah Kota Tasikmalaya menjalin hubungan yang cukup baik dalam konteks pembangunan daerah. Dalam konteks itu, berdasarkan data, Kota Tasikmalaya memiliki jumlah ulama sebanyak 1.788 orang. Sedangkan jumlah pesantren sebanyak 266 lembaga pesantren.

Kota Tasikmalaya memiliki perjalanan panjang dalam pembangunan daerah. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut dimulai sejak reformasi tahun 1998. Pada masa ini melahirkan konsep desentralisasi dan menjadi *trend* yang cukup menarik. Sebab, selama masa orde baru daerah-daerah sangat sentralistik ke Jakarta. Dalam pandangan (Nordholt et al., 2007), konsep desentralisasi tersebut dapat diartikan sebagai delegasi tugas-tugas yang diberikan kepada daerah, sementara pusat masih menguasai tanggung jawab secara keseluruhan di satu sisi, di sisi lain peran tersebut juga diartikan dekonsentrasi, yang mengacu pada pergeseran *decision-making* dalam negara tersentralisasi yang disesuaikan dengan undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki peran yang strategis.

Peran selanjutnya, bersifat devolusi, hal ini menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini, desentralisasi erat kaitannya dengan aspek manajerial (kepemimpinan daerah), sumber daya manusia, organisasi pemerintah daerah, budaya birokrasi publik, dan politik lokal.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang mandiri dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka membangun dan memberikan pelayanan yang optimal dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya memiliki tanggungjawab pengelolaan pembangunan secara otonom.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam proses pemekaran Kabupaten Tasikmalaya, keterlibatan ulama secara langsung dapat dilihat dalam upaya pembentukan visi dan misi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu, para ulama mengusulkan tentang visi Kabupaten Tasikmalaya dengan memasukan kata 'religius islami', sedangkan untuk visi Kota Tasikmalaya dengan memasukan kata 'iman' dan 'takwa'. Visi tersebut didorong oleh ulama yang menyadari bahwa kedudukan Kota Tasikmalaya dengan kota yang ada di daerah Priangan Timur seperti Garut, Sumedang, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran memiliki kedudukan strategis (Janah, 2023).

Selanjutnya, terkait kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat berdasarkan peraturan daerah Kota Tasikmalaya nomor 9 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut disusun misi pembangunan. Hal ini tercermin dari upaya untuk mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang bernuansa agamis, demokratis, taat hukum, dan berwawasan global, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya membangun hubungan yang intensif dengan tokoh agama. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi Kota Tasikmalaya mendukung pelaku bisnis yang bergerak pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian mempunyai daya saing tinggi serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Konsep visi yang telah dijelaskan di atas, diharapkan untuk menjadi petunjuk dan arah bagi pembangunan daerah. Hal ini menjadi acuan bagi setiap kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya dengan mengakomodir aspirasi para ulama. Konsep kolaborasi yang akomodatif terhadap aspirasi kaum ulama dapat diwujudkan sejak awal pemekaran Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam konteks ini, peran sosial politik ulama sudah teruji yang membentuk tatanan sosial masyarakat (Muslim, 2015)

Berdasarkan hal tersebut, posisi ulama dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pembangunan dimulai dari pola kerjasama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat Kota Tasikmalaya. Hubungan tersebut tersistem dalam sebuah jaringan kerja (*net working*) mereka sendiri. Dari realitas tersebut, ulama dan pemerintah selalu seirama dalam pemberdayaan masyarakat.

Merujuk kajian tentang ulama Indonesia diteorikan dengan istilah *cultural broker* (Geertz, 1960). Ulama berfungsi sebagai penghubung antara negara modern dengan masyarakat tradisional. Penggunaan istilah *cultural broker* ini adalah suatu proses seorang ulama sebagai makelar budaya yang melakukan seleksi terhadap budaya yang bisa diterima maupun budaya yang harus ditolak. Teori ini mengimplikasikan seolah-olah makelar budaya itu

tidak memiliki pandangan-pandangan dan pendekatan-pendekatan yang orisinal.

Menurut Wolf dalam (Horikoshi, 1987), teori Geertz lebih dekat dengan teori mediator. Teori ini dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menempati posisi penghubung atau perantara masyarakat dalam sistem nasional yang bercorak perkotaan. Hal tersebut bergantung pada posisi strukturnya dalam jaringan masyarakat yang kompleks, penghubung ini dapat juga diperankan oleh pemimpin tradisional yang membentengi suatu kondisi yang rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan keseluruhan sistem yang lebih luas dan sering bertentangan, menjaga terpeliharanya kekuatan pendorong dalam dinamika masyarakat, hal ini diperlukan bagi kegiatan-kegiatan mereka.

Penelitian Geertz (*cultural brokers*) mengandung sejumlah kelemahan disaat arus informasi dan perkembangan teknologi semakin maju dan tidak bisa terbendung, sehingga ulama lambat laun mengalami penurunan peran. Berbeda dengan Geertz, penelitian Horikoshi memberikan pendapat bahwa ulama sebagai kekuatan perubahan sosial (*agen of social change*) bukan saja pada masyarakat pesantren, tetapi juga pada masyarakat luas.

Dalam penelitian berikutnya, menurut (Fealy, 2003), sudah menjadi hal lazim dalam tradisi ulama memberikan penjelasan-penjelasan tentang pemecahan berbagai persoalan. Eksistensi ulama dalam stuktur masyarakat menempati posisi yang strategis, eksistensi tersebut dapat melahirkan perubahan sosial. Ulama adalah pemimpin spiritual sekaligus seorang wiraswastawan yang independen. Ulama juga berfungsi sebagai agen kontrol sosial, memengaruhi norma dan perilaku masyarakat melalui pengajaran agama, fatwa, dan jaringan masjid. Hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, memberi makna bahwa ulama memiliki kekuasaan signifikan dalam membentuk pendapat publik dan memobilisasi dukungan untuk tujuan tertentu. (Ali, 2010).

Senada dengan pendapat di atas, pandangan (Turmudi, 2004), ulama dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, memiliki kekuatan untuk memberikan semacam legitimasi moral bagi setiap langkah dan kebijakan pemerintah. Pada titik inilah hubungan pemerintah dan ulama saling menguntungkan dalam konteks penguatan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, ulama juga memiliki fungsi perubahan sosial, artinya fungsi keulamaan mengalami perkembangan, tidak hanya memiliki fungsi keagamaan saja (Hajar, 2009). Bahkan, menurut Wahid dalam (Zulkifli, 2018), ulama biasanya menggagas dan melakukan perubahan-perubahan atas praktik sosial yang berlandaskan pada ‘memelihara yang lama yang masih baik dan menerima, bahkan menciptakan hal-hal yang baru yang lebih baik’, dalam kerangka ini, ulama memelopori perubahan sosial untuk menciptakan perbaikan dalam bidang keagamaan, sosial ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, melengkapi pendapat di atas, menurut (Madjid, 1994), ulama sebagai pemimpin agama berperan dalam memperkuat aspek moral dan etika dalam pembangunan. Mereka dapat memastikan bahwa proses pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai moral, seperti keadilan sosial, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Azra, 2000).

Dalam konteks kekinian, dengan kualitas kharisma yang melekat dalam diri, ulama mampu memasuki sistem kekuasaan yang begitu rumit sehingga mereka secara aktif melakukan perubahan sendiri. Karena itu, posisi ulama mengalami pergeseran dan peningkatan peran dalam sistem sosial (Zulkifli, 2018). Keberadaan ulama dalam masyarakat memiliki peran sosial dan budaya, mereka berperan sebagai figur yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung, maupun aktor. Ulama tidak hanya mengemban peran agama, dakwah, dan pendidikan, tetapi juga mengemban peran politik, yaitu sebagai penasihat penyelenggara pemerintah, setidaknya sebagai tempat meminta pertimbangan terhadap berbagai kebijakan pembangunan (Nasution, 2017). Ulama menjadi tokoh sentral dalam dunia Islam kontemporer, dia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Ulama adalah penjaga tradisi sekaligus inovator yang memainkan peran kunci dalam menjaga relevansi Islam di dunia modern yang terus berubah (Zaman, 2002). Dengan demikian, kajian tentang posisi ulama dapat dilihat dalam sektor kehidupan sosial dan politik. Ulama tidak hanya berposisi dalam *scope* keagamaan saja namun juga mendukung pembangunan suatu daerah. Dengan *privelege* yang

dimiliki ulama, dia sering menjadi mitra pemerintah dalam membantu dan membimbing tujuan pembangunan (Janah, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi ulama yang cukup strategis dalam sistem dan struktur masyarakat yang sedang mengalami perubahan akibat pembangunan. Posisi tersebut berbanding lurus dengan beragamnya respons terhadap persoalan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya. Tujuan selanjutnya, untuk menjelaskan posisi ulama sebagai mitra pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan terakhir, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan ulama sebagai mediator, aktor, dan motivator pembangunan di kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memahami fenomena khusus guna mempelajari kasus secara mendalam. Dengan metode ini, penelitian mampu mengidentifikasi hubungan antara objek dan subjek penelitian. Selain itu, penelitian untuk mengembangkan teori agar ditemukan teori baru. Secara empiris, seluruh data dihasilkan dari lapangan dan bersifat *induktif*. Penggunaan metode tersebut, agar data-data di lapangan dapat ditemukan, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis dan terukur. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dan berakhir pada awal tahun 2021. Rangkaian kegiatan di lokasi penelitian meliputi observasi partisipan terhadap objek untuk melihat fenomena dan perkembangan objek yang diteliti (Goode et al., 1952 & Basrawi et al., 2008), sedangkan wawancara dilakukan secara *face to face* terhadap informan penelitian (Suyanto, 2008), berikutnya studi dokumentasi terhadap dokumen, arsip serta jurnal online yang otoritatif dan relevan dengan tema penelitian. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk teknik pengumpulan data dari lapangan. Hasil penelitian ini terlihat dari fenomena yang dijelaskan (Strauss et al., 2003).

Selanjutnya, sumber data primer dalam penelitian ini adalah empat ulama yang otoritatif dan Walikota Tasikmalaya. Data primer tersebut berfungsi sebagai informan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive*

sampling. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan informan dibagi menjadi dua kriteria. *Pertama*, ulama yang memiliki lembaga pendidikan pesantren dan memiliki kegiatan wirausaha, dan *Kedua*, pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tinggi serta pemegang kebijakan dalam Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel I.I tentang kriteria informan di bawah ini:

Tabel 1.

Kriteria Informan

NO	Jenis Kriteria	Nama informan
1	Ulama yang memiliki lembaga pendidikan pesantren dan memiliki kegiatan wirausaha	MF, AMB DDF, AB
2	Pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tinggi dan pemegang kebijakan	MY

Penentuan lokasi (Kecamatan Indihiang dan Cibeureum) berdasarkan pertimbangan bahwa dua kecamatan tersebut memiliki kriteria yang berbeda. Kecamatan Indihiang merupakan pusat Pemerintahan Kota Tasikmalaya dan Kecamatan Cibeureum sebagai pusat dan barometer pesantren di Kota Tasikmalaya. Secara umum, Kota Tasikmalaya merupakan kota santri yang memiliki jumlah ulama yang cukup banyak, disamping itu Kota Tasikmalaya merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan dalam pembangunan. Pengolahan dan analisis data dilakukan sejak awal penelitian dengan melakukan pemaknaan atau interpretasi terhadap hasil wawancara, kemudian proses reduksi data dengan cara menyeleksi data yang relevan dan menghilangkan data yang tidak penting dengan membuat katagorisasi. Kegiatan selanjutnya adalah proses verifikasi dengan memeriksa struktur data untuk memastikan kesesuaian data yang akan disajikan (Creswell, 2017).

Dengan demikian, data yang dihasilkan akan terjaga kredibilitasnya dan dapat disajikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Posisi Ulama dan Pemerintah Kota Pemerintah

Sejak lama, keberadaan Kota Tasikmalaya dikenal dengan julukan kota santri, suatu kota yang masyarakatnya damai, santun, dan agamis (Sulaeman, 2016). Kondisi tersebut didukung oleh hubungan antara pemerintah dan ulama untuk selalu saling menjaga. Hal ini diperkuat dengan lahirnya sejumlah peraturan daerah yang didorong oleh kaum ulama Kota Tasikmalaya. Penelitian ini membuka kenyataan bahwa ulama memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur sosial masyarakat. Mereka memberikan bimbingan dan saran bagi setiap kebijakan pembangunan daerah sehingga memperkuat posisinya sebagai orang yang memiliki otoritas keagamaan. (Muslim. et al., 2015).

Fungsi dan posisi ulama sangat besar dalam menggalakan semangat pembangunan. Selama ini, ulama menjadi mitra utama Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyukseskan pembangunan daerah. Melalui pesan-pesan agama serta persesuaiannya dengan langkah kebijaksanaan pembangunan daerah dan tetap memperhatikan fungsi masing-masing, ulama mendorong masyarakat agar meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan (Ramadhan, 2013).

Keterlibatan dan respons ulama di Kota Tasikmalaya dalam proses kegiatan pembangunan, hanya pada aspek pembangunan unsur ruhaniah dan jasmaniah (Kahmad, 2006). Ulama yang terlibat dalam praktik pembangunan di daerah menjadi unsur kekuatan dan legitimasi moral bagi proses pembangunan yang terjadi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ulama dengan kekuatan simbol dan otoritas keagamaannya memberikan pengaruh yang kuat kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Karena itu, ulama memegang peranan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diungkapkan oleh seorang ulama yang mengatakan:

“Selama ini pemerintah Kota Tasikmalaya selalu berkomunikasi dengan para ulama. Baik ulama yang berada di Forum Pondok Pesantren Kota Tasikmalaya, maupun dengan organisasi ulama yaitu MUI Kota Tasikmalaya. Bentuk hubungan tersebut dalam kerangka implementasi pembangunan yang berorientasi keumatan. Selama ini Kota Tasikmalaya sering disebut sebagai kota santri, maka hubungan antara ulama dan umara menjadi sangat strategis dalam menjaga arah dan masa depan Kota Tasikmalaya, banyak program yang dikerjasamakan dengan pihak ulama dan pesantren”. (AMB, 2020).

Dalam sepuluh tahun terakhir, eksistensi ulama di Kota Tasikmalaya berbanding lurus dengan posisi dan tanggung jawab mereka dalam mengantarkan pembangunan Kota Tasikmalaya yang lebih *religius*. Kenyataan ini didukung dengan adanya hubungan intens antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan di Kota Tasikmalaya. Kebijakan tersebut, terutama berhubungan dengan pembangunan keumatan. Hal ini dapat dilihat dalam table 1.1. tentang variasi hubungan ulama dan pemerintah di bawah ini.

Tabel 2.
Variasi hubungan ulama dan Pemerintah Kota Tasikmalaya

NO	Mediator Pembangunan	Aktor Sosial	Motivator Pembangunan
1	Mediasi dalam merumuskan visi misi kota Tasikmalaya	Penjaga tradisi dan ortodoxi keagamaan	Menanamkan prinsip etik dan moral kehidupan
2	Mediasi dalam merencanakan pembangunan daerah (RPJMD)	Pelaku integrasi pembangunan bidang pendidikan keagamaan-umum (IPM)	Penanaman kemandirian (wirausaha)
3	Mediasi dalam pembentukan Perda tata nilai Kota Tasikmalaya	Pelaku pembangunan sarana prasarana keagamaan	Penguatan teologi pemberdayaan masyarakat
4	Mediasi dalam membangun sinergi kaum agamawan dan pemerintah	Pelaku bisnis dan politik	Mendidik dan mengajar masyarakat

Data hasil penelitian (diolah)

Terkait hal ini, menurut (Fikri, 2016), posisi ulama sebagai mitra bagi pemerintah tidak berarti bahwa posisi mereka sebatas menjadi simbol legitimasi saja, tetapi posisi ulama sebagai mitra dalam kerangka

mewujudkan pembangunan yang adil dan beradab. Posisi ini sejalan dengan konsep dan tugas ulama untuk menjalankan perintah dan kewajiban agama. Karena itu, menurut ulama, kebijakan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran merupakan salah satu bagian dari kebijakan negara yang berlandaskan asas-asas kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan. (Rasyid, 2007). Oleh karena itu, hubungan positif antara ulama dan pemerintah Kota Tasikmalaya terwujud dengan melakukan komunikasi melalui Forum Pondok Pesantren dan organisasi ulama yang berada di Kota Tasikmalaya. Bentuk hubungan tersebut dalam kerangka implementasi pembangunan yang berorientasi keumatan.

Selanjutnya, guna melihat realitas yang berkembang di Kota Tasikmalaya terkait ulama yang intens dalam merespons persoalan-persoalan sosial. Ulama di Kota Tasikmalaya memiliki ciri khas tersendiri, mereka senantiasa menjadi bagian dari proses perkembangan pembangunan. Ulama menjadi elit sosial yang bekerjasama dalam pembangunan daerah dalam bidang sosial dan budaya. (Makmur, 2012).

Selama ini, pembangunan Kota Tasikmalaya selalu melibatkan semua *stakeholder* sehingga menjadi dasar terjalinnya hubungan yang cukup harmonis antara pihak swasta dan pemerintah daerah. Kerjasama dan hubungan tersebut berdasarkan pada konsep saling percaya (*trust*), bukan mengembangkan prasangka negatif di antara mereka. Hubungan kemitraan tersebut, terjalin dengan baik karena dilandasi dengan prinsip untuk saling melengkapi. Fakta ini diperkuat oleh walikota Tasikmalaya yang mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Kota Tasikmalaya memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada visi dan misi yang selama ini menjadi petunjuk dalam menentukan setiap lahirnya program dan kebijakan. Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengajak dan melibatkan kaum agamawan” (MY, 2020).

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi Kota Tasikmalaya adalah “Dengan iman dan takwa Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa

Barat”. Karena itu, pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektornya. Perwujudan visi Kota Tasikmalaya didukung oleh karakteristik masyarakat yang dikenal sebagai wirausahawan yang tangguh dan agamis. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan dorongan dan pasilitas yang memadai dari pemerintah daerah. Selama ini, belanja pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga alokasi kegiatan belanja pemerintah harus ditekankan pada upaya pengembangan jiwa *entrepreneurship* untuk seluruh masyarakat.

Dalam setiap gerak pembangunan, upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting karena bisa meningkatkan efektivitas keberlanjutan pembangunan, terutama dalam penanggulangan masyarakat pra sejahtera. Dalam konteks ini, sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk yang belum sejahtera semata-mata sebagai objek pembangunan. Pemberdayaan penduduk pra sejahtera dilakukan agar mereka dapat keluar dari persoalan tersebut dan tidak jatuh kembali ke dalam hal yang sama.

Oleh karena itu, dalam dokumen strategi pengurangan kemiskinan Kota Tasikmalaya tahun 2017, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki desain untuk merancang pembangunan daerah melalui program-program yang langsung digulirkan kepada masyarakat. Misalnya, kebijakan politik yang diarahkan kepada keluarga yang terkena dampak masalah kesejahteraan sehingga dapat ditangani dan dievaluasi secara berjenjang. Kebijakan ini didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek pertimbangan yuridis formal dan kondisi sesungguhnya masyarakat yang kurang sejahtera. Karena itu, seorang memperkuat hal ini dengan penjelasannya sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pembangunan memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Untuk mewujudkan program ini pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kebijakannya yaitu dengan memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausahawan baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka” (AB, 2020).

Dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya tahun

2017, langkah penting dalam penanganan masalah sosial tersebut, dilakukannya pendataan secara terpadu terhadap rumah tangga yang terkena masalah kemiskinan. Hasilnya menunjukkan, bahwa Kota Tasikmalaya memiliki problem kemiskinan yang harus ditangani melalui penanganan keadaan rumah tangga. Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Dalam konteks ini, Ulama juga memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok marginal. Mereka sering kali menjadi advokat bagi masyarakat pra sejahtera, menggunakan posisi mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam setiap konteks pembangunan daerah, upaya pengurangan masyarakat pra sejahtera selain harus mementingkan proses juga perlu didukung cara kerja yang baik dari institusi yang terlibat, khususnya pihak pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, sehingga pelaksanaan program terhindar dari penyimpangan dan kebocoran. Keterlibatan pemangku kepentingan sebagai motor penggerak dalam penyusunan strategi pengurangan masyarakat pra sejahtera dapat melibatkan masyarakat tersebut secara partisipatif dalam upaya menggali permasalahan, kebutuhan, serta potensi yang mereka hadapi.

Strategi yang dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang diciptakan oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat agar mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhannya sendiri. Selain hal tersebut, strategi dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat pra sejahtera agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya. Dan terakhir, memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat pra sejahtera.

Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat misi pembangunan berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, yang mampu mendukung keberkelanjutan pembangunan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan antar sektor pembangunan.

Selain hal tersebut, dalam pelayanan publik harus berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip pemerintahan yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan iklim yang mandiri dan partisipatif bagi semua lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Peningkatan indeks pembangunan manusia merupakan tujuan yang menjadi arah bagi setiap pembangunan. Ukuran baik buruknya dan berhasil atau tidaknya pembangunan dapat dilihat dalam tiga indeks pembangunan. Indeks tersebut yaitu; indeks pendidikan, indeks ekonomi, dan indeks kesehatan. Keberhasilan pembangun daerah dapat diukur melalui seberapa tinggi indeks tersebut. Jika indeksnya rata-rata di bawah standar maka pemerintah daerah belum bisa dikatakan berhasil dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Misi dan indeks pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong agar masyarakat berperan serta dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar, sehingga akhirnya berdampak pada penurunan angka masyarakat yang kurang sejahtera. Dalam konteks tersebut, pemerintah sebagai lembaga negara adalah institusi paling bertanggung jawab atas masalah kesejahteraan dan keamanan warganya (Prayogo. et al., 2012).

Selanjutnya, berdasarkan komitmen bersama, bahwa pembangunan harus tepat sasaran, terutama bagi masyarakat pra sejahtera, dapat dipastikan mereka tertolong dengan melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi mereka (Janah, 2021). Hal ini, sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen global yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sasaran pengurangan masyarakat pra sejahtera adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pra sejahtera secara bertahap.

Pentingnya pelaksanaan pembangunan harus memiliki prinsip bahwa masyarakat pra sejahtera biasanya diakibatkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada mereka (Syarifulloh, 2012). Hal ini menyebabkan *output* pertumbuhan tidak

terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pra sejahtera, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Seharusnya, pembangunan tidak membuat masyarakat mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, untuk menjaga hal tersebut perlu tersedia program-program yang berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya program tersebut, bisa dilakukan pola kerjasama dengan pihak swasta. Seperti halnya dengan para ulama, kerjasama dapat diwujudkan melalui pembangunan lembaga pendidikan pesantren dan lembaga usaha. Pada akhirnya, hal ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pembangunan masyarakat. Ulama dengan lembaga yang dimilikinya telah lama menjadi entitas yang terlibat langsung dalam proses pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Kenyataan ini diungkapkan oleh seorang ulama sebagai berikut:

“Berbagai variasi dan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan kaum pesantren. Selama ini, hubungan antara ulama dan pemerintah dalam pembangunan Kota Tasikmalaya lebih dilandasi oleh kepentingan bersama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.” (MF, 2020).

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan program atau kegiatan pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh satu lembaga, tetapi memerlukan kerja sama antar sektor. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, diperlukan koordinasi dan konsultasi, baik secara *vertikal*, maupun *horizontal*. Karena itu, pelibatan lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah sangat diperlukan. Berbagai upaya melibatkan kelompok agama seperti ulama dan pondok pesantren di beberapa tempat sangat efektif (Mahfudh, 2003).

Realitas selanjutnya, dalam laporan kinerja walikota Tasikmalaya tahun 2017, bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk gerakan

Tasikmalaya bersedekah. Gerakan ini sebagai upaya membangun program kemitraan dan kegiatan antara pemerintah, pengusaha, dan badan amil zakat daerah. Tujuannya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah. Untuk mensukseskan program tersebut, pemerintah membentuk forum *Community Social Responsibilities*. Dengan demikian, hubungan ulama dan pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan pelaksanaan dari kerjasama antar sektor yang telah berjalan selama ini. Fakta ini diungkapkan oleh walikota yang mempertegas hal tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah melibatkan langsung para tokoh agama termasuk para ulama melalui program-program yang telah dicanangkan pemerintah Kota Tasikmalaya. Program ini dikelola secara swadaya yang dikoordinasikan oleh Baznas Kota Tasikmalaya melalui program Tasikmalaya bersedekah ini” (MY, 2020).

Adanya hubungan antara lembaga swasta dalam pembangunan daerah membuktikan bahwa selama ini telah terjadi kerjasama yang bersifat asosiatif. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi *core* atas kondisi ini. Berdasarkan data, program pemerintah yang melibatkan unsur masyarakat tersebut dikelompokkan menjadi beberapa sasaran. Data ini akan dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan daerah, secara khusus dalam program pemberdayaan masyarakat pra sejahtera. Pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu (Widayanti, 2012).

Pembahasan

Mediator Pembangunan Politik

Dalam konteks pembangunan politik, merujuk pada pendapat (Hefner, 2011), ada tantangan dan konflik, seperti gerakan radikal Islam dan ketegangan antara kelompok muslim yang berbeda, Hefner menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menemukan keseimbangan antara Islam dan demokrasi. Ini terjadi melalui konsensus politik yang melibatkan berbagai

kelompok Islam, termasuk mereka yang mendukung demokrasi dan mereka yang lebih konservatif.

Terkait dengan posisi ini, menurut (Hasyim, 2007), ulama sebagai mediator antara politik dan agama. Mereka menggunakan pengaruh keagamaan untuk membentuk opini publik, mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, dan mengarahkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ulama memainkan peran penting dalam mendefinisikan bagaimana Islam dipraktikkan dan diintegrasikan dalam konteks politik modern Indonesia. Hubungan antara agama dan negara menjadi hal penting dalam realitas politik saat ini (Dahlan, 2017).

Keberadaan ulama menjadi tokoh penting yang bisa mengarahkan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan daerah. Hal ini terjadi pada ulama yang secara intens terlibat dalam pembangunan negara. Secara tegas menurut (Suprayogo, 2009), ulama memiliki peran signifikan dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat. Kenyataan ini sejalan dengan kepercayaan yang tertanam dalam diri masyarakat. Terutama kepercayaan masyarakat berdasarkan sistem nilai dan keyakinan. Sosok ulama, baik yang memiliki pesantren maupun yang tidak memiliki pesantren sangat dihormati oleh masyarakat (Aryani, 2019).

Posisi ulama tidak hanya menyangkut soal otoritas keagamaan saja. Pada masa sekarang, ulama berperan aktif dalam pembangunan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa ulama berkontribusi dalam mendorong program pemerintah, khususnya pembangunan. Bentuk keterlibatan tersebut dapat dilihat dalam tindakan dan perilaku mereka yang selalu memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan. Nilai-nilai Islam ditarik ke dalam pembangunan kesejahteraan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara (Sila, 2010).

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan daerah, biasanya kepemimpinan ulama pengaruhnya melebihi kepemimpinan tokoh formal, sebab ulama merupakan simbol pemegang otoritas agama Islam. Dalam hal tertentu, tokoh politik menjadikan ulama sebagai magnet yang bisa memberikan pengaruh untuk mengajak masyarakat dalam menentukan pilihan politik (Nasir, 2016).

Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi isu-isu populis yang paling diterima oleh masyarakat Kota Tasikmalaya adalah isu-sisu agama dan pembangunan. Masyarakat menginginkan bahwa pembangunan daerah harus berbasis pada nilai-nilai religius. Dalam konteks ini, komoditas agama di ruang publik menjadi hal yang menarik. Dan di sisi lain, ulama menjadi corong penerapan nilai religius. Hal ini didukung oleh jaringan ulama yang menguasai simpul-simpul masa sampai ke tingkat kelurahan. Hal ini menggambarkan maraknya fenomena transformasi peran kiai dari tugas pokoknya sebagai pembina pesantren menjadi seorang aktor, pendukung, dan partisipan dalam partai politik. Posisi ulama dengan ilmu dan wibanya berpengaruh bagi masyarakat (Mastori. et al., 2021).

Berdasarkan analisis hasil wawancara, terkait keterlibatan ulama sebagai mediator pembangunan politik dimulai sejak pemilihan kepala daerah pada tahun 2007. Hasil pemilihan kepala daerah tersebut menempatkan pasangan 'SH'-'DS' menjadi pemenang. Sosok 'SH' sendiri faktanya sebagai seorang guru yang berlatar belakang Islam modernis, dilingkungannya ia dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, humoris serta memiliki berbagai keunggulan, seperti pandai berorasi dan berceramah. Masyarakat memandangnya sebagai sosok ulama dan sekaligus umara.

Selanjutnya, bentuk akomodatif dari kepentingan politik kaum ulama pada masa kepemimpinan 'SH'-'DS', pada saat itu dicetuskan suatu gagasan tentang pola pengaturan kehidupan yang harus berdasarkan pada 'Syariat Islam'. Hal ini yang mendorong semangat untuk memformalisasikan 'Syariat Islam' dalam bentuk peraturan daerah. Dalam perjalanannya, Perda tersebut sempat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Perda ini akhirnya harus direvisi karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab, Kota Tasikmalaya tidak memiliki kekhususan sebagaimana daerah istimewa Aceh. Selanjutnya, Perda tersebut mengalami banyak revisi sampai berakhirnya masa kepemimpinan 'SH'-'DS'. Setelah itu, dilanjutkan oleh kepemimpinan 'BB' dan 'DS' untuk periode 2012-2017.

Pada masa kepemimpinan 'BB'-'DS', politik akomodatif dari tuntutan para ulama tersebut juga dilaksanakan dengan mengubah nama perda tersebut menjadi Perda 'Tata Nilai'. Realitas ini menunjukkan bahwa hubungan ulama dengan pemerintah Kota Tasikmalaya terjadi secara intens.

Hubungan ulama tersebut tidak ‘sebatas’ dukungan tetapi meminta formalisasi nilai-nilai Islam di ruang publik. Atas dasar tuntutan politik itu munculah keberpihakan negara dalam mengakomodir kepentingan politik kaum ulama. Realitasnya arah tentang Islam dan negara yang praktiknya sampai saat ini diakomodir oleh pemerintah daerah secara legal formal. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dan berkolaborasi dengan ulama (Witro, 2020).

Perda tata nilai menjadi mata rantai hubungan antara ulama dan pemerintah dalam pembangunan Kota Tasikmalaya. Perda tata nilai dibuat untuk mendorong suasana dan lingkungan yang agamis, karena selama ini Kota Tasikmalaya identik dengan kota santri (Ikhsandi, 2022). Terkait implementasi Perda tata nilai, Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat tim pelaksana yang disinergikan dengan masyarakat. Tim inilah yang banyak melibatkan para ulama. Pelaksanaan Perda tersebut dimulai dari proses sosialisasi di Mesjid Agung Kota Tasikmalaya.

Dengan demikian, pembentukan Perda tata nilai yang melibatkan kaum ulama dipahami sebagai bentuk pendefinisian kepentingan masyarakat umum dalam konteks kepentingan lembaga-lembaga pengendali seperti lembaga pesantren atau keagamaan. Kondisi ini sebenarnya jauh lebih terorganisir dan adaptif dalam menentukan keputusan dan mengembangkan kebijakan dibanding dengan masyarakat yang tidak teratur.

Aktor Pembangunan Sosial dan Pendidikan

Aspek paling penting dalam pembangunan manusia adalah upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh serta didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan sehingga memiliki daya saing tinggi. Upaya mewujudkan hal tersebut, ulama di Kota Tasikmalaya telah melakukannya melalui jalur pembangunan pendidikan formal. Peran ulama dalam merespons pembangunan tersebut, dapat dilihat pada lembaga pesantren yang mendirikan sekolah formal. Dalam perkembangannya, pesantren menjadi pusat pendidikan yang terintegrasi dengan sistem sekolah formal (Janah, 2023).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan telah masuk pada tantangan perkembangan jaman yang semakin maju. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kehidupan semakin

instan. Dengan ilmu dan teknologi manusia mampu meminimalisir problem-problem teknis dalam persoalan kehidupan nyata. Realitas ini membuat kalangan pesantren memiliki peluang yang sama dalam memajukan kehidupan manusia. Peluang dalam bidang pendidikan menjadi penting karena tradisi pesantren memadukan modernitas pendidikan dalam pembangunan peradaban Indonesia modern (Dhofier, 2011).

Posisi ulama sebagai aktor pembangunan sosial dalam bidang pendidikan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat transmisi nilai-nilai ajaran Islam (Zulkifli, 2018). Karena itu, ulama di Kota Tasikmalaya menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk mencetak manusia agar memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak yang terpuji. Pada masa sekarang, sistem pendidikan di pondok pesantren lebih memadai dan terintegrasi. Lembaga pendidikan pondok pesantren memiliki budaya serta kelembagaan yang menyatu dengan lingkungan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh DDF sebagai berikut:

“Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan tentu pesantren memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama dalam bidang pengembangan perekonomian, dalam hal ini pesantren memiliki peran sentral dalam lingkungan sosial budaya masyarakat. Pesantren harus mampu bertahan dan berkembang khususnya dalam bidang perekonomian tanpa kehilangan ciri khas sebagai lembaga pendidikan” (DDF, 2020).

Pendidikan merupakan proses multidimensi yang didalamnya terkandung proses pembentukan karakter manusia. Selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menurut (Rahman, 1982), pendidikan merupakan aset paling fundamental dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan karakter bangsa. Diantara tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Bahkan lebih dari itu, tujuan akhir dari pendidikan, agar manusia bisa memiliki dan mencapai derajat kebijaksanaan (*wisdom*) dan kearifan hidup.

Tugas seorang ulama untuk membina tentang baik dan buruknya sebuah tindakan manusia berdasarkan moral (Taufik, 2022).

Keunggulan pendidikan pesantren terletak pada prinsip penanaman nilai-nilai agama yang bersifat universal. Pada posisi ini, ulama memiliki sumbangan yang signifikan dalam pembangunan mental dan karakter manusia. Pembangunan mental terletak pada nilai-nilai kejujuran, dan sikap sebenarnya (Mardiyah, 2012). Sikap jujur ini menjadi ciri khas bagi seluruh dimensi pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh ulama.

Dengan demikian, sebagai aktor sosial dalam pembangunan pendidikan, ulama memberikan pendidikan karakter kepada santri maupun siswa. Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan yang berbasis kepada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Realitas ini menunjukkan bahwa pesantren sebagai basis penjaga *ortodoxi* Islam. (Zaman, 2002). Dalam praktiknya, pendidikan di pesantren tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat *keagamaan-sich* tetapi pada masa sekarang pendidikan pesantren telah masuk pada ruang pendidikan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan umum (Rahman, 1982).

Motivator Etos Kerja dan Pembangunan

Berdasarkan berbagai kajian, terutama menurut (Horikoshi, 1986), ulama memegang peranan penting dalam konteks perubahan sosial. Perubahan sosial itu dapat dilakukan oleh ulama dengan memberikan pandangan tentang peningkatan etos kerja dalam kehidupan. Pembangunan mental bisa dilakukan melalui kegiatan penerangan, ceramah, motivasi, dan contoh yang baik kepada masyarakat. Pada posisi ini ulama menjadi motivator untuk membangkitkan masyarakat setempat.

Peran sebagai motivator tersebut dilakukan oleh ulama di Kota Tasikmalaya, mereka tidak hanya sebatas menjadi ulama yang mengajar agama di pesantren, tetapi juga ulama mampu berposisi sebagai kaum wirausahawan yang mandiri. Ulama memberikan contoh nyata dalam praktik pembangunan etos kerja. Gerak pembangunan masyarakat, diperlukan etos kerja yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat akan maju karena memiliki kemandirian usaha yang dapat membantu keberlangsungan dan kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Dalam pandangan (Mardani, 2023), penanaman etos kerja yang tinggi kepada masyarakat dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan bekerja dan berusaha. Tujuannya untuk mendapatkan kekayaan yang diorientasikan untuk bisa membantu sesama manusia yang membutuhkan. Jika masyarakat telah memiliki mental tersebut, maka kehidupannya akan berubah dan secara perlahan status sosialnya akan meningkat. Sikap dan cara pandang seperti ini menurut para ulama harus dirawat dan dijaga.

Oleh karena itu, dalam menanamkan etos kerja kepada masyarakat, ulama terlebih dahulu memberikan contoh melalui pengelolaan bisnis yang mereka miliki. Bisnis yang dilakukan oleh ulama untuk membangun umat agar memiliki sikap mandiri dan kreatif. Tindakan para ulama tersebut, didorong oleh kesadaran terhadap nilai kejujuran dan kerja keras (Mardani, 2023). Selanjutnya, dalam upaya menyampaikan bimbingan kepada masyarakat, ulama menggunakan media pengajian majlis taklim dan sejenisnya. Di tempat ini, mereka membangun kesadaran tentang pentingnya kemandirian, kerja keras dalam berusaha. Masyarakat diberikan penjelasan tentang bekerja adalah ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Pembangunan etos kerja yang disampaikan oleh para ulama di mimbar-mimbar khutbah atau juga di pesantren bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam. Kehidupan masyarakat akan lebih mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Selain hal tersebut, masyarakat agar memiliki keterampilan dalam pengelolaan kegiatan usaha dan ekonomi. Hal ini akan menjadi modal dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu alat guna mencapai kompetensi dalam bekerja (Rimbawan, 2013).

Oleh sebab itu, menurut (Asy'arie, 2016), masyarakat pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang kreatif yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan karakter kreatifnya masyarakat bisa mengolah dan memakmurkan bumi, dengan etos kerja manusia dapat menghadapi kenyataan hidup secara kreatif dan bermoral.

Dalam pandangan ulama, landasan yang menjadi dasar bagi individu untuk bisa memiliki etos kerja yang tinggi harus bersumber pada keyakinan (*belief*). Sumber ini yang mendorong jiwa manusia untuk memahami dunia

dalam kerangka ketundukan dan kepatuhan kepada yang menciptakan. Aktualisasi nilai-nilai agama tersebut menjadi hal penting dalam pergaulan antar manusia. Semua keyakinan tercermin dalam perilakunya. Keyakinan tersebut merupakan manifestasi iman yang menjadi pendorong bagi setiap perilaku dan perbuatan manusia serta memberi makna berarti pada kehidupan.

Selanjutnya, menurut (Qodir, 2008), ajaran Islam yang bersifat teologis harus memiliki sudut pandang yang berorientasi pada kesalehan sosial. Sehingga nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kebutuhan masyarakat menjadi dasar dan ukuran seseorang dalam pengambilan keputusan.

Hasil pembahasan di atas, menunjukkan ada sejumlah implikasi praktis dan teoretis dalam konteks pembangunan daerah. Adapun implikasi teoretis bahwa ulama dapat berperan dalam pembangunan. Secara praktis hasil penelitian sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan suatu daerah dengan melibatkan partisipasi kaum ulama.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki strategi dan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan dalam proses implementasinya mengakomodir peran dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Kota Tasikmalaya. Komponen masyarakat tersebut adalah ulama. Mereka dianggap penting dan memiliki keistimewaan dalam struktur sosial masyarakat Kota Tasikmalaya.

Ulama sebagai pemimpin agama yang kontribusinya tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan daerah. Peran ulama dianggap dapat memberikan dampak terhadap pembenahan mental masyarakat. Selain itu, ulama yang memiliki lembaga pendidikan dan lembaga usaha, mereka dianggap bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.

Penelitian ini membuktikan bahwa posisi ulama dengan pemerintah dalam konteks pembangunan dapat terjalin melalui program nyata yang dirumuskan bersama-sama. Selanjutnya, terkait dengan posisi ulama sebagai mitra pemerintah dapat dilihat dalam tiga temuan sebagai berikut:

Pertama, dalam konteks pembangunan, ulama berposisi sebagai

mediator sosial dan politik. Mereka terlibat dalam perumusan kebijakan dan pembuatan sejumlah peraturan daerah. Dalam realitas tersebut, menunjukkan adanya keterlibatan kaum ulama. Keterlibatannya dapat dilihat pada tindakan dan perilaku mereka yang selalu memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan. Karena itu, pengaruh kepemimpinan ulama seringkali melebihi kepemimpinan tokoh formal. Hal ini disebabkan ulama memiliki daya tarik atau kharisma. Oleh karena itu, ulama sebagai simbol dan pemegang otoritas keagamaan. Biasanya, tokoh politik dan masyarakat menjadikan ulama sebagai *mediator* yang bisa memberikan pengaruh untuk menentukan pilihan politik dan pembangunan.

Kedua, dalam konteks pendidikan, ulama berposisi sebagai *aktor sosial* yang terlibat secara intens mengaggas dan mewujudkan pembangunan pendidikan dan keagamaan. Pembangunan yang dilakukan oleh ulama agar setiap santri dan siswa memiliki kemampuan (*competence*) yang berbasis kepada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Faktanya ulama sebagai penjaga tradisi dan *ortodoxi* Islam. Ulama tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat *keagamaan-sich* tetapi pada masa sekarang posisi ulama berkembang dan telah masuk pada pengelolaan pendidikan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan umum.

Ketiga, dalam konteks etos kerja, ulama berposisi sebagai *motivator* yang memberikan bimbingan untuk menanamkan semangat kerja dalam berusaha bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Posisi sebagai motivator tersebut dilakukan oleh ulama sebagai kaum wirausahawan yang mandiri. Ulama secara kongkrit memberikan contoh nyata dalam praktik pembangunan etos kerja dan amal usaha.

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada integrasi dan strategi pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat bahwa posisi ulama sebagai *partner* pemerintah dalam pembangunan daerah. Hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Eksistensi ulama menjadi legitimasi dan penguat moral dalam proses kebijakan pembangunan daerah. Fakta ini didukung dengan keterlibatan ulama secara langsung dalam bidang politik dan hukum yang melahirkan peraturan daerah serta bentuk pembangunan lainnya, seperti dalam bidang sosial, keagamaan, ekonomi, dan

bisnis. Posisi ulama berada titik krusial, ia bertindak dalam peran sosial yang bervariasi. Dua teori yang dikembangkan dalam penelitian ini (Geertz & Horikoshi) menunjukkan bahwa ulama berperan sesuai dengan ruang dan waktu yang berjalan.

Terakhir, penelitian ini masih mengandung sejumlah kekurangan dan keterbatasan. Penelitian ini hanya fokus pada daerah tertentu (khususnya Kota Tasikmalaya) yang berbeda dengan daerah lain. Masing-masing daerah memiliki kekhasan dan keunikan tertentu sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir. Perlu ada penelitian lebih lanjut agar dihasilkan teori-teori baru yang bisa dijadikan landasan untuk perkembangan pembangunan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, L. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4 (1). <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.1994>.
- Asy'arie, M. (2016). *Dalektika Islam Etos Kerja Dan Kepra sejahteraan*. Yogyakarta : LESFI.
- Azra, A. (2000). The Ulama and Political Leadership: Role of Religious Scholars in Modern Muslim Society. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 7(3), 67-90.
- Creswell, John W. (2017), *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dahlan, M. (2017). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1-28. <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama; sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta : LKiS.
- Fikri, S. (2016). "Posisi Ulama Dalam Pemerintahan Kota Padangsidimpuan". *Jurnal Tazkir*, 2 (1), 68. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.402>

- Geertz, C. (1960). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker*, Source: Comparative Studies in Society and History 2, Published by: Cambridge University Press.
- Hajar, I. (2009), *Kiai di Tengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa*. Yogyakarta : Irchisod
- Hasyim, S. (2007). Ulama and Politics in Indonesia: The Political Role of the Ulama during the New Order Era and Beyond. *Asian Journal of Social Science*, 35(4-5), 846-870.
- Hefner, R.W. (2011). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 42(2), 201-221.
- Horikoshi, H. (1987), *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta : P3M
- Ikhsandi.,Yuningsih., Akbar., (2022). Dinamika Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 17 (2), 103. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138>
- Ismail, F. (2001). Islam, Politics, and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 1-23.
- Janah, M. (2023). Transfer Kapital: Studi Praktik Ulama Dlam Pengentasan Kepra sejahteraan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17 (1), 65-85. <https://dx.doi.org/10.14421/jsa.2023.171.05>.
- Kahmad, D. (2006), *Sosiologi Agama*. Bandung : Rosda Karya.
- Laporan Dokumen Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya (2017), *LKPJ-AMJ*. Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Madjid, N. (1994). The Role of Religious Leaders in Social and Economic Development in Muslim Societies. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 32(2), 201-219.
- Mahfudh, S. (2003), *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta : LKiS.
- Makmur. (2012). Perananan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. *Jurnal Miqot*, 36, 188
- Mardani., Masuroh., Wan Ali. (2023). Tauhidunomic: Religious Ethics and Economic Growth in Tasikmalaya. *Jurnal Temali*, 6 (2), 119-131. <https://dx.doi.org/10.15575/jt.v6i2.26036>.

- Mardiyah. (2012), *Kepemimpinan Kiai Dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Malang : Aditya Media Publishing.
- Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical Review of Ulama and Ulama' Relations and Its Implications for Islamic Da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 103-126. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.9824>.
- Mohammad, F. (2014), *Revitalisasi Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Morodemak*. Semarang : LPM IAIN Walisongo.
- Muslim, A., Kolopaking, L. M., Dharmawan, A. H., & Soetarto, E. (2015). Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 461-474. <http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>.
- Nasir. N. (2016). Kyai dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politik Profetik*, 3 (2). <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i242>.
- Nasr, S.V.R. (1996). Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. *Islamic Studies Journal*, 35 (3), 107-124.
- Nasution, D. (2017). Kiyai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19 (2), 184. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.10346>.
- Nordholt, & Klinken. (2007), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Qodir, Z. (2008). Islam, Muhammadiyah dan Advokasi Kemiskinan. *Jurnal La Riba*, 2, (1), 142. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.artg>.
- Prayogo, D., & Hilarius, Y. (2012). Efektivitas program csr/cd dalam pengentasan kemiskinan; studi peran perusahaan geotermal di jawa barat. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 17(1), 8-29. <https://doi.org/10.7454/MJS.v17i1.1189>.
- Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. *Islamic Quarterly: A Review of Islamic Culture*, 26(4), 45-58.
- Ramadhan, M.F.S. (2013). Revitalisasi Dimensi Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Madura Melalui Peran Kyai Dan

- Pesantren. *Jurnal Karsa*, 21 (1), 81.
<https://doi.org/10.19105/Karsa.v20i232>.
- Rasyid, H. (2007), *Bimbingan Ulama Kepada Umara Dan Umat*. Jakarta : Pustaka Beta.
- Riaz, A. (2010). Ulama, State and Politics: On Islamisation of Politics in Pakistan. *Journal of Islamic Studies*, 21(1), 45-69.
- Rimbawan, Y. (2013). Pesantren Dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Krian BM., Sidoarjo Jawa Timur. *Proceedings Of Annual International Conference On Islamic studies AICIS XII*. Surabaya : UIN Surabaya. 1182.
- Risdiana, A. (2016). Budaya Organisasi Pondok Pesantren Berbasis NU dan Persis Benda 67 di Tasikmalaya Jawa Barat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 73-83.
<http://dx.doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1169>.
- Sila, M.A. (2010). Islam Dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial. *Journal Dialog. Journal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 66, (33), 3.
- Sulaeman, M. (2016). Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Komitmen Terhadap Etos Kerja Dan Dampaknya Kepada Kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17 (2), 103-113.
<https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3788>.
- Suprayogo, I. (2009), *Kiai Dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. Malang : UIN Malang Press.
- Syarifulloh. (2012). Penanggulangan Kemiskinan. *Journal Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 2,(35), 1.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v35i2.117>.
- Taufik, M. (2022). Etika Hamka Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 21(2), 165-190. <https://doi.org/10.14421/ref.v21i2.3125>.
- Turmudi, E. (2004), *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta : LKiS.
- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, (1), 95.
- Witro, D. (2020). Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review

Relations of Religion and State. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 135-144.

<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v24i2.5220>.

Zaman, M.Q. (2002). The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 22(1), 89-102.

Zulkifli. (2013). The Ulama In Indonesia Between Religious Authority and Symbolic Power. *Jurnal MIQOT*, 37, 180.

<https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>.

Zulkifli. (2018), *Menuju Teori Praktik Ulama*. Ciputat: Haja Mandiri.